

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amrani, Nurnaningsih, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Putaka, 2011.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Fajar, Mukti, et.al, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Harahap, Yahya M., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, Cetakan kedua, 1986.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Khairandy, Ridwan, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UII Press, 2016.
- Manullang, Fernando M., *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni, 1999.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suyud Margono, , *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet-24, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

2. Jurnal

- Azani, Cynthia et.al, Perluasan Tanggung Jawab Formal Kantor Pertanahan dalam Balik Nama Sertipikat dengan Adanya Gugat Pihak Ketiga (Studi Putusan MA No. 3537/K/Pdt/2015), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 4, 2022.
- Benuf, Kornelius et.al, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, 2020.
- Chandra, Rendra O. F., Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Menurut PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 3, 2020.
- Lubis, MHD. Arfan Marjawi, Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Kelalaian BPN dan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 48/G/2021/PTUN-Mdn), *Jurnal*

Smart Hukum, terdapat dalam
<https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/view/141/131>.

Oe, Meita Djohan, Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah, *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, 2015.

Sahnan, M. Arba, L. Wira, Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 3, 2019.

Setiawan, Agus, Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Swantoro, Herri et.al, Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, 2017, hlm. 193.

Wijayanta, Tata, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2014.

Yasa, I Wayan et.al, Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Zulfahmi Nur, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Imam Syatibi), *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2023.

3. Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2015/PN JKT.Sel.

Putusan Nomor 443/PDT/2016/PT DKI.

Putusan Mahkamah Agung No.997 K/Pdt/2017.

4. *Websites*

Siti Yuniarti, *Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Binus Law,
https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/#_ftn5.